



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DWI AMPERAWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 274044

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.540.000.000

1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/148 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 463.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH/MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 185.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 274.821.807



## F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---  
Rp. 3.462.821.807

## III. HUTANG

Rp. ---  
Rp. 3.462.821.807

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.